

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT MUSLIM MINASA UPA
STUDI TENTANG PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN
TERHADAP PERDA No. 3 TAHUN 1990



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT (P3M) IAIN ALAUDDIN
UJUNG PANDANG
1994/1995

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT MUSLIM MINASA UPA
STUDI TENTANG PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN
TERHADAP PERDA No. 3 TAHUN 1990



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT (P3M) IAIN ALAUDDIN
UJUNG PANDANG
1994/1995

ABSTRAK

Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tk.II Ujung Pandang, dikeluarkan sebagai penjabaran dari UU - tentang Lingkungan Hidup. Kedudukan Perda tersebut sangat penting dalam upaya menjaga dan memelihara pelestarian lingkungan hidup. Demikian juga upaya mensukseskan Program Pemda guna mewujudkan Ujung Pandang sebagai kota yang TEDUH BERSINAR.

Pelaksanaan Perda tersebut di Kotamadya Ujung Pandang, khususnya di Kompleks Perumahan BTN Minasa Upa masih belum menyeluruh dan maksimal. Beberapa pasal dari Perda tersebut yang diteliti dan digolongkan sebagai aspek pemahaman telah berjalan dengan BAIK meskipun masih perlu peningkatan.

Pada aspek pelaksanaan (law Enforcement) beberapa pasal yang diteliti dari Perda Tersebut juga belum menyeluruh dan maksimal. Bahkan dari beberapa aspek malah terjadi pelanggaran yang disengaja. Untuk itu upaya sosialisasi dan keterpaduan penegakannya antara Pemda dan masyarakat perlu peningkatan dan berkesinambungan.

Aspek pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam (kebersihan sebagian dari iman) dalam kaitannya dengan Perda No. 3 Tahun 1990 sangat menggembirakan, karena secara umum dapat dipahami dan dilaksanakan dengan amat baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Syukur Alhamdulillah, penelitian ini telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana. Penelitian ini dilakukan sebagai pelaksanaan Keputusan Rektor IAIN Alauddin Tentang Pelaksana Peneliti Tahun Anggaran 1994/1995. Penelitian yang biaya pelaksanaan penelitiannya dibebankan kepada dana SPP/DPP IAIN Alauddin tahun - anggaran 1994/1995.

Kami pun menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini secara keseluruhan, masih terdapat kekurangan-kekurangan, sebagai akibat dari kurangnya pengalaman dan pengetahuan metodologis dan teoritis. Olehnya itu, kami membuka diri dari kritikan dan saran, terutama yang konstruktif.

Akhirnya kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk terlaksananya penelitian ini, terutama kepada:

- a. Bapak Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
- b. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang yang juga turut merestui penulis untuk melakukan penelitian.

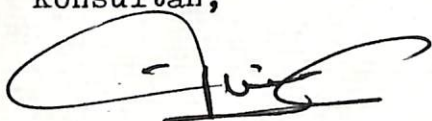
- c. Bapak Ketua Lembaga Penelitian IAIN Alauddin .
beserta stafnya.
- d. Bapak Drs.H.Amir Paita,S.H. sebagai konsultan.
- e. Bapak Kepala Kelurahan Persiapan Gunung Sari
beserta stafnya.
- f. Bapak Kepala Kantor Kecamatan Tamalate b eserta
stafnya.
- g. Bapak Kepala Dines Pendapatan Daerah Kota Madya
Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi dunia ilmiah dan juga dapat menjadi pertimbangan - bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang demi suksesnya pembangunan di daerah ini.

Ujung Pandang, Januari 1995
peneliti

- 1.a. Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT MUSLIM MINASA UP
STUDI TENTANG PEMAHAMAN DAN
PELAKSANAAN TERHADAP PERDA
No. 3 TAHUN 1990
- b. Macam Penelitian :
- c. Kategori Penelitian :
- 2.Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama Lengkap : AHKAM JAYADI,SH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol./Nip : Penata (III/c) 150231530
- d. Jabatan Sekarang : Lektor Muda
- e. Fakultas/Jurusan : Syari'ah
- f. Bidang Penelitian : Sosiologi Hukum
- 3.Jumlah Tim Peneliti : Perorangan
- 4.Lokasi Penelitian : Minasa Upa Ujung Pandang
- 5.Jangka Waktu : 6 (enam) Bulan
- 6.Biaya Yang Disetujui :

Konsultan,

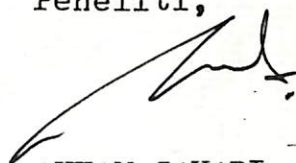


DRS. H. AMIR PAITA,SH.

Nip. 150 003 086

Ujung Pandang, Agustus 1994

Peneliti,



AHKAM JAYADI,SH.

Nip. 150 231 530

Mengetahui,

Kepala P3M IAIN

Alauddin Ujung Pandang



DRS. H. AMIR PAITA,SH.

Nip. 150 003 086

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin

Nomor : 69 Tahun 1994

t e n t a n g

PELAKSANA PENELITIAN ILMIAH TAHUN

ANGGARAN 1994/1995

dengan judul :

KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN

MASYARAKAT MUSLIM MINASA UPA

STUDI TENTANG PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN

TERHADAP PERDA No. 3 TAHUN 1990

1. Peneliti : AHKAM JAYADI,SH.
2. Konsultan : DRS. H. AMIR PAITA,SH.

Ditetapkan di : UJUNG PANDANG

Pada tanggal : 4 Agustus 1994

REKTOR,

ttd.

DRS. H. M. SHALEH PUTUHENA

NIP. 150015460

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	-
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN KONSULTAN	iv
LAMPIRAN SK REKTOR	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 7
 BAB III. METODE PENELITIAN	 14
3.1. Lokasi Penelitian	14
3.2. Populasi dan Sampel	15
3.3. Jenis Sumber Data	16
3.4. Analisa Data	17
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	 18
4.1. Data Penelitian	18
4.1.1. Aspek Pemahaman	19
4.1.2. Aspek Pelaksanaan	31
4.1.3. Aspek Agama	37
4.2. Analisis Data	42
 BAB V. PENUTUP	 64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup (GBHN 1993 - 1998 : 91).

Lingkungan hidup yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu direhabilitasi agar kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan dan penegakan hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan ditingkatkan. Dalam upaya pengendalian pencemaran dapat digunakan berbagai perangkat ekonomi dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai agar kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah termasuk limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah berbahaya serta beracun perlu ditingkatkan agar kualitas lingku-

ngan hidup yang lestari dapat terjamin keberlanjutannya (GBHN 1993 - 1998 : 92).

Dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam mengembangkan tata guna air perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan air yang cukup dan bersih serta berkesinambungan, pencegahan banjir dan kekeringan, pencegahan kemerosotan mutu dan kelayakan air, serta penyelamatan daerah aliran sungai. Setiap perubahan keadaan dan fungsi lingkungan berikut segenap unsurnya perlu terus dinilai dan dikendalikan secara saksama agar pengamanannya dan perlindungannya dapat dilaksanakan setepat mungkin (GBHN 1993 - 1998 : 92).

Manusia dengan lingkungan dengan demikian tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan hidup,

demikian juga kondisi lingkungan hidup sangat ditentukan bagaimana perlakuan manusia yang ada terhadapnya.

Kesalahan perlakuan manusia terhadapnya (lingkungan hidup) dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, baik berupa pencemaran maupun bencana alam. Kehawatiran akan bahaya tersebut telah mendorong pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup.

Minasa Upa sebagai salah satu kompleks perumahan juga sarat dengan berbagai permasalahan lingkungan hidup. Baik permasalahan yang menyangkut lingkungan fisiknya maupun lingkungan non fisiknya.

Kompleks perumahan BTN Minasa Upa yang berada di bawah wilayah kelurahan persiapan Gunung Sari dulunya berada dibawah wilayah kekuasaan kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Sampai saat ini telah terdapat : 3183 rumah dalam berbagai tipe yang pembangunannya dilaksanakan oleh Developer PT. Timu Rama Ujung Pandang.

Sebuah kompleks perumahan yang cukup besar dengan penduduknya yang beragam. Baik menyangkut latar belakang pendidikan; latar belakang suku (daerah asal); usia; pekerjaan dan termasuk latar belakang agama.

Masalah lingkungan hidup yang potensial untuk menimbulkan masalah adalah antara lain: masalah kebersihan rumah tangga dan kebersihan lingkungan perumahan; pengelolaan limbah rumah tangga; sanitasi; air bersih kebutuhan -

rumah tangga dan sebagainya. Untuk itu penelitian yang berkaitan dengan masalah ini, tentu sangat diperlukan.

Dalam Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Ujung Pandang, Perda tersebut dikeluarkan sebagai salah satu bentuk penjabaran UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam Perda tersebut di atur antara lain: Pengelolaan kebersihan lingkungan rumah tangga maupun kebersihan lingkungan kompleks perumahan adalah tanggung jawab masyarakat setempat bersama pemerintah daerah. Untuk itu wujud kerjasama penyelenggaraan kebersihan tersebut di atur lebih jauh di dalam perda di atas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalahnya sekarang sejauh mana masyarakat yang ada di Minasa Upa telah memahami dan melaksanakan perda tersebut.

Maka masalah pokok yang akan diteliti adalah: "Sejauh mana Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat I Ujung-Pandang di lingkungan masyarakat muslim Minasa Upa".

Sebagai batasan penelitian, maka penelitian ini akan membatasi hanya akan meneliti beberapa pasal yang ada di dalam Perda No. 3 Tahun 1990 yang dianggap penting dan relevan untuk diteliti. Demikian juga penelitian ini dibatasi hanya meneliti masyarakat muslim (penganut ajaran islam) dengan demikian juga diharapkan akan terungkap kemungkinan

pengaruh ajaran agama islam bagi pemeluknya untuk mewujudkan kebersihan lingkungan.

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka sub masalah yang akan diteliti adalah:

1. Sejauhmana pemahaman masyarakat muslim Minasa - Upa terhadap Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, khususnya tentang pengelolaan kebersihan lingkungan rumah tangga dan lingkungan perumahannya.
2. Sejauhmana pelaksanaan pemahaman pengelolaan kebersihan lingkungan rumah tangga dan lingkungan perumahan di Minasa Upa berdasarkan permasalahan pertama di atas.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang pemahaman masyarakat muslim Minasa Upa tentang Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
2. Penelitian ini bertujuan pula untuk memperoleh deskripsi tentang pengelolaan lingkungan hidup (kebersihan lingkungan) di kompleks perumahan BTN Minasa Upa.

1.3.2. Kegunaan Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kualitas lingkungan hidup di lingkungan perumahan BTN Minasa Upa khususnya dan Kelurahan Persiapan Gunung Sari Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Manusia pada dasarnya bukan hanya makhluk biologis melainkan juga makhluk sosial. Hubungan sosial yang sudah merupakan perintah alam tersebut haruslah berjalan dengan tertib. Untuk menjamin keteraturan dan ketertiban, terdapat serangkaian petunjuk tentang bagaimana seorang anggota masyarakat harus berbuat. Salah satu di antara berbagai petunjuk hidup itu adalah hukum. (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1984 : 40).

Masyarakat sebagai tempat dan objek pengaturan hukum adalah suatu satuan kehidupan sosial manusia yang menempati suatu ruang dan wilayah tertentu. Keteraturan dalam kehidupan masyarakat tersebut dimungkinkan oleh adanya seperangkat pranata-pranata sosial. Pranata sosial yang paling mendasar adalah keluarga.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana mengusahakan agar warga masyarakat secara maksimal mematuhi hukum, tanpa menerapkan paksaan atau kekerasan. Sebab terkadang hukumnya baik, kewibawaan petugas dan fasilitas pendukung yang cukup, tetapi masyarakat tetap tidak mematuhi hukum.

Purnadu Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1985 : 50 - 51) mengemukakan tujuh nilai pokok yang terdapat dalam eksistensi hukum untuk dicapai atau diwujudkan ke serasiannya melalui manifestasi hukum, salah satu pasangan

adalah: Pasangan antara kesadaran penguasa dan warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum, keserasiannya dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum.

Pengamatan terhadap berlakunya hukum secara lengkap ternyata menurut Satjipto Rahardjo (1983 : 13) melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

1. Peraturan sendiri. Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka pada aspek peraturan ini di batasi pada Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
2. Warga Negara sebagai sasaran pengaturan. Pada aspek ini yang kita akan bicarakan adalah warga masyarakat yang ada di lingkungan perumahan BTN Minasa Upa.
3. Aktifitas birokrasi pelaksana. Yang dimaksud di dalam aspek ini adalah aparat pemerintah di bidang kebersihan.
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi, budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Disamping hal tersebut menurut beliau (1983 : 26) sangat penting pula untuk menyadari bahwa hukum itu juga merupakan variabel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga perkembangannya juga akan ditentukan oleh apa yang

terjadi di sektor kehidupan masyarakat yang lain.

Soerjono Soekanto (1985 : 6) mengemukakan bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Ketaatan (compliance).
2. Ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance).
3. Dan pengelakan (evasion).

Agar undang-undang mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku masyarakat, maka perlu diciptakan kondisi-kondisi tertentu agar hukum mempunyai pengaruh yang positif. Oleh karena itu, kondisi yang harus ada antara lain adalah, hukum itu harus dikomunikasikan.

Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti tertentu. Tujuan dari pada komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku.

Dengan demikian, maka sikap mempunyai komponen kognitif, afektif maupun konatif. Komponen kognitif menyangkut persepsi terhadap keadaan sekitarnya yang antara lain mencakup pengetahuan. Komponen afektif berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang. Komponen konatif berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan untuk bertindak atau untuk berbuat terhadap sesuatu. (Soerjono Soekanto - 1985 : 17).

Dengan lebih jelas Baharuddin Lopa (1987 : 3-4) juga mengemukakan, ada tiga komponen atau tiga unsur atau tiga syarat yang dimungkinkannya ditegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Pertama, diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji.

Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Kiranya komponen ketiga inilah yang sesungguhnya paling dominan, karena baik peraturan maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu. Untuk terwujudnya kesadaran hukum yang kondusif untuk penegakan hukum, dibutuhkan pemahaman akan makna dan tujuan dari hukum tersebut.

Dengan demikian kesadaran hukum ialah adanya anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. (Baharuddin Lopa 1987 : 4).

Demikian halnya dengan hukum lingkungan, juga sarat dengan permasalahan dalam upaya penegakannya dalam masyarakat. Apa yang di sebut dengan hukum lingkungan itu ? Mochtar Kusumaatmadja (Seminar BPHN 1977 : 15) mengemukakan, bahwa sistim pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendeka-

tan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, dan untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup.

Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*ntuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. (Koesnadi Hardjasoemantri - 1988 : 35-36). Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Disamping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtlijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, adapula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah, dan untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Pemda telah mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sebagai salah satu bentuk peraturan daerah yang mengatur masalah kebersihan lingkungan.

Penjabaran pengelolaan lingkungan hidup dalam skop penyelenggaraan kebersihan di Kota madya Ujung Pandang yang telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 1990. Salah satu aspek yang berperan dalam pelaksanaan penegakan Perda No. 3 Tahun 1990 adalah faktor warga

masyarakat yang di atur oleh Perda tersebut.

Aspek-aspek yang berpengaruh dalam kaitan ini adalah aspek pemahaman akan materi perda tersebut serta aspek pelaksanaan perda tersebut yang dikaitkan dengan aspek pertama (pemahaman) di atas karena tanpa pemahaman maka tidak mungkin dapat lahir kesadaran hukum untuk melaksanakannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dengan kedua pendekatan ini; aspek pemahaman dan aspek pelaksanaan materi perda tersebut, akhirnya kita akan dapatkan apakah perda tersebut dapat di pahami dan dilaksanakan oleh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang diteliti yaitu di Minasa Upa.

Pada aspek pemahaman materi perda akan di teliti hal hal yang berkaitan dengan:

- a. Pemahaman akan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan kebersihan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan seperti: bak sampah; mobil pengangkut sampah dan kegiatan-kegiatan pengelolaan kebersihan.
- c. Pemahaman tentang beban pengenaan retribusi kebersihan oleh Pemda kepada masyarakat.

Pada aspek pelaksanaan, akan diteliti sejauh mana pelaksanaan dari aspek-aspek pemahaman yang dikemukakan di atas.

Aspek pemahaman dan aspek pelaksanaan adalah dua hal yang sangat berperan bagi masyarakat sebagai salah satu dimensi yang berperan penting dalam penegakan hukum. Meskipun kita telah pahami bahwa aspek masyarakat bukan adalah satu-satunya aspek yang menentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Mengingat wilayah Kota Madya Ujung Pandang sangat luas terlebih lagi dengan kemampuan dana dan waktu yang tersedia, maka lokasi penelitian harus di batasi.

Untuk penelitian ini lokasinya di batasi hanya dalam kompleks perumahan BTN Minasa Upa. Sebuah kompleks perumahan yang berlokasi di kelurahan persiapan Gunung-Sari, Kecamatan Tamalate Kota Madya Ujung Pandang.

Lokasi tersebut di pilih mengingat adanya beberapa pertimbangan diantaranya; jumlah perumahan yang cukup banyak demikian juga dengan pluralisme masyarakatnya baik menyangkut latar belakang suku dan pendidikannya yang relatif tinggi. Dengan demikian penelitian ini akan dapat menjadi perbandingan untuk warga masyarakat Ujung Pandang lainnya.

Pemilihan lokasi tersebut juga di dasari oleh pertimbangan bahwa di lokasi kompleks perumahan BTN Minasa Upa, permasalahan penyelenggaraan kebersihan masih terdapat berbagai permasalahan. Diantaranya pengelolaan sampah rumah tangga yang belum dikelola dengan baik.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di kompleks perumahan BTN Minasa Upa Kelurahan Persiapan Gunung Sari Kecamatan Tamalate. Pengambilan sampelnya atau masyarakat yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat yang beragama islam (muslim) dengan cara Stratified Random Sampling.

Jumlah atau prosentase sampel disesuaikan dengan jumlah penduduk muslim di kompleks perumahan tersebut. Dari data yang ada terlihat (Kelurahan Persiapan Gunung Sari 1994) sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kecamatan Tamalate = 223.390 jiwa yang terpola dalam = 32.018 rumah tangga.
- b. Jumlah penduduk yang berdomisili di Kelurahan - Persiapan Gunung Sari = 22.485 jiwa, dengan proporsi penduduk berdasarkan agama adalah:
 1. penduduk yang beragama Islam = 20.978 jiwa
 2. penduduk yang non Islam = 1.507 jiwa
- c. Dari jumlah tersebut di atas, yang berdomisili di kompleks perumahan BTN Minasa Upa adalah:
 1. jumlah penduduk = 13.924 jiwa.
 2. jumlah kepala keluarga yang terdaftar adalah sebanyak = 3133 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak = 3183 rumah.
- d. Dari 3133 KK yang ada tersebut maka yang ditetapkan di Minasa Upa adalah = 2194 KK (70 %).

Dari jumlah kepala keluarga yang menetap tersebut maka terdapat penduduk non Islam = 220 KK (10 %).
e. Dengan demikian jumlah penduduk muslim adalah sebanyak = 1974 KK.

Dari jumlah = 1974 KK tersebut ditetapkan sampel sebesar 10 %. Suatu jumlah sampel yang cukup tinggi sehingga diharapkan dapat mewakili populasi masyarakat Min asa Upa yang beragam Islam.

Dengan demikian jumlah sampel adalah 10 % dari 1974 maka jumlah sampel = 197,4 dibulatkan menjadi = 198 KK.

Perumahan BTN M¹nasa Upa terbagi ke dalam 10 ORW - Untuk itu setiap RW di bagi secara merata untuk pengedaran kuesioner dalam hal ini 9 ORW mendapat masing-masing sebanyak 20 koesioner dan satu ORW mendapat 18 kuesioner.

Penyebaran sampel secara merata tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap ORW memiliki berbagai kesamaan warganya. Misalnya rata-rata mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, pada umumnya mereka adalah pegawai negeri atau swasta, sehingga tingka kesamaan pengetahuan juga cenderung sama.

3.3. Jenis Sumber Data

Untuk data primer akan diperoleh dari masyarakat muslim yang menjadi sampel penelitian dengan cara kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal ini data sekunder tersebut diperoleh dari Kantor Kelurahan Persiapan Gunung Sari; dari Kantor Kecamatan Tamalate dan dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang dan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang.

3.4. Analisa Data

Data yang terkumpul akan di olah menjadi tabel Distribusi Frekuensi, lalu akhirnya di analisis berdasarkan tabel-tabel yang ada tersebut. Dengan hasil-hasil dari analisis tersebut akhirnya kita akan memperoleh kesimpulan tentang hasil penelitian ini.

Adapun skala pengukuran adalah:

81 % - 100 % = Amat Baik

70 % - 80 % = Baik

60 % - 69 % = Sedang

- 59 % = Kurang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Data Penelitian

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa jumlah responden penelitian ini untuk memperoleh data primer adalah sebanyak = 198 responden.

Dengan demikian juga diedarkan sebanyak 198 kuesioner yang merata ke seluruh Organisasi Rukun Warga (ORW). Setelah kuesioner dikumpulkan dan kemudian di edit dan dikelompokkan, ternyata kuesioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis hanya sebanyak = 160 kuesioner.

Kuesioner (sebagaimana terlampir) terdiri dari tiga kategori pertanyaan yaitu:

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek "Pemahaman" terhadap Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek "Pelaksanaan" dari Perda No. 3 Tahun 1990.
3. Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek "Pemahaman ajaran agama" tentang kebersihan lingkungan rumah tangga dan lingkungan perumahan.

Data penelitian seperti dimaksud di atas dapat di kemukakan sebagaimana terurai berikut ini:

4.1.1. Aspek Pemahaman

Tabel 1

Jenis tempat tinggal saudara

kategori (k)	frekuensi (f)	persentase(p)
1. Bangunan darurat	-	-
2. Bangunan semi permanen	-	-
3. Bangunan permanen	153	95,6 %
4. Bangunan permanen bertingkat	7	4,4 %
Jumlah	160	100 %

Tabel 2

Apakah saudara sependapat bahwa kebersihan lingkungan rumah tangga dan lingkungan perumahan berpengaruh bagi kehidupan

kategori	frekuensi	persentase	
1. Sangat berpengaruh bagi kehidupan	156	97,50	%
2. Kurang berpengaruh bagi kehidupan	3	1,88	%
3. Tidak berpengaruh bagi kehidupan	1	0,62	%
Jumlah	160	100	%

Tabel 3

Pernakah saudara mendapat informasi
atau semacam penyuluhan atau penataran
tentang kebersihan lingkungan

kategori	frekuensi	persentase	
1. Pernah	123	76,875	%
2. Tidak pernah	33	20,625	%
3. Ragu-ragu	4	2,5	%
Jumlah	160	100	%

Tabel 4

Dari mana saudara mendapat informasi
tentang kebersihan lingkungan

kategori	frekuensi	persentase	
1. Dari teman	20	12,5	%
2. Dari media cetak	54	33,75	%
3. Dari media elektronik	41	25,625	%
4. Dari mesjid	8	5,0	%
5. Tidak pernah dapat informasi dan ragu-ragu	37	23,125	%
Jumlah	160	100	%

Tabel 5

Bila saudara tidak pernah mendapat informasi atau penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, kenapa ?

kategori	frekuensi	persentase	
1. Tidak pernah perhatikan	26	16,25	%
2. Tidak pernah ada penyuluhan atau informasi tersebut	9	5,625	%
3. Ragu-ragu	2	1,25	%
4. Yang pernah mendapat informasi	123	76,875	%
Jumlah	160	100	%

Tabel 6

Siapakah menurut saudara yang harus melaksanakan tugas pengelolaan ke -
bersihan lingkungan

kategori	frekuensi	persentase	
1. Tugas Pemda	4	2,50	%
2. Tugas masyarakat	16	10,00	%
3. Tugas Pemda dengan peran serta masyarakat	140	87,50	%
Jumlah	160	100	%

Tabel 7

Apakah saudara tahu bahwa dilarang
buang sampah selain di tempat yang
telah ditentukan

kategori	frekuensi	persentase
1. Ya	160	100 %
2. Tidak tahu	-	-
3. Ragu-ragu	-	-
Jumlah	160	100 %

Tabel 8

Apakah ada pemungutan retribusi
kebersihan di daerah saudara

kategori	frekuensi	persentase
1. Ada pemungutan retribusi	85	53,125 %
2. Pernah ada pemungutan retribusi	26	16,250 %
3. Tidak ada pemungutan retribusi	49	30,625 %
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 9

Bagi saudara yang pernah atau masih membayar, bagaimana pendapat saudara tentang besarnya uang retribusi tersebut

kategori	frekuensi		persentase	
	rum.td bert.*	rum.bert.*		
1. Mahal	12	-	7,50	%
2. Tidak mahal (sesuai)	94	-	58,75	%
3. Perlu dinaikkan	4	-	2,50	%
4. Ragu-ragu	50	-	31,25	%
Jumlah	160		100	%

* rumah tidak bertingkat

* dan rumah bertingkat

Tabel 10

Bagaimana caranya saudara
membayar retribusi tersebut

kategori	frekuensi	persentase	
1. Di datangi petugas (kolektor)	85	53,125	%
2. Membayar ke ORT/ORW atau kelurahan	26	16,250	%
3. Tidak membayar	49	30,625	%
Jumlah	160	100,00	%

Tabel 11

Bagaimana pendapat saudara tentang
adanya penarikan uang retribusi
kebersihan tersebut

kategori	frekuensi	persentase	
1. Tidak perlu ada (sebaiknya tidak bayar)	21	13,125	%
2. Seharusnya ada penarikan retribusi	125	78,125	%
3. Ragu-ragu	14	8,750	%
Jumlah	160	100,00	%

Tabel 12

Bagaimana menurut saudara, warga
yang tidak membayar retribusi
kebersihan

kategori	frekuensi	persentase	
1. Perbuatan melanggar hukum	108	67,500	%
2. Bukan perbuatan melanggar hukum	21	13,125	%
3. Ragu-ragu	31	19,375	%
Jumlah	160	100,00	%

4.1.2. Aspek Pelaksanaan

Tabel 13

Rumah tangga yang bebas dari sampah dan kotoran sebaiknya selalu menjadi perhatian, untuk itu berapa kali saudara membersihkan rumah

kategori	frekuensi	persentase
1. Setiap pagi	-	-
2. Setiap sore	-	-
3. Setiap pagi dan sore	147	91,875 %
4. Tidak tetap	13	8,125 %
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 14

Apakah di Lingkungan perumahan saudara sering dilakukan kegiatan membersihkan lingkungan, bagaimana caranya

kategori	frekuensi	persentase
1. Dengan kerja bakti		
sesama warga	68	42,50 %
2. Masing-masing warga		
membersihkan sekitar		
rumahnya	92	57,50 %
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 15

Apakah di rumah saudara ada tempat
pembuangan sampah sementara (bak -
sampah)

kategori	frekuensi	persentase
1. Ada	155	96,875 %
2. Tidak ada	5	3,125 %
3. Pernah ada	-	-
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 16

Dilingkungan perumahan-saudara
(ORT/ORW), apakah ada tempat
pembuangan sampah umum (bak sampah
umum) sementara

kategori	frekuensi	persentase
1. Ada	113	70,625 %
2. Tidak ada	47	29,375 %
3. Pernah ada	-	-
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 17

Bagaimana cara pengelolaan
sampah di lingkungan saudara

kategori	frekuensi	persentase
1. Di bakar	47	29,375 %
2. Di tanam	8	5,00 %
3. Di angkut oleh petugas kebersihan	105	65,625 %
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 18

Apakah di rumah atau di lingkungan
perumahan saudara, saudara pernah
membuang sampah di sembarang tempat

kategori	frekuensi	persentase	
1. Pernah membuang sampah di sembarang tempat	42	26,25	%
2. Tidak pernah membuang sampah di sembarang tempat	108	67,50	%
3. Ragu-ragu	10	6,25	%
Jumlah	160	100,00	%

4.1.3. Aspek Pemahaman Agama

Tabel 19

Apakah upaya mewujudkan kebersihan
serta menjaga kebersihan rumah
tangga dan lingkungan perumahan di
ajarkan dalam agama saudara

kategori	frekuensi	persentase	
1. Diajarkan dalam agama yang saya anut (kebersihan sebagian dari iman)	154	96,25	%
2. Tidak diajarkan dalam agama yang saya anut	3	1,875	%
3. Ragu-ragu	3	1,875	%
Jumlah	160	100,00	%

Tabel 20

Bagaimana pendapat saudara tentang
kebersihan bila dikaitkan dengan
orang beragama

kategoti	frekuensi	persentase
1. Orang beragama harus memperhatikan kebersihan	157	98,125 %
2. Orang beragama tidak perlu terlalu memperhatikan kebersihan	-	-
3. Ragu-ragu	3	1,875 %
Jumlah	160	100,00 %

Tabel 21
Aspek Pemahaman Terhadap Perda
No. 3 Tahun 1990

Kategori	frekuensi	persentase
1. perlunya kebersihan lingkungan bagi kehidupan		97,50 %
2. informasi tentang kebersihan lingkungan		76,875 %
3. media tempat memperoleh informasi		76,875 %
4. Tugas pengelolaan kebersihan		87,50 %
5. dilarang buang sampah di sembarang tempat		100,00 %
6. adanya retribusi kebersihan lingkungan		53,125 %
7. persepsi tentang besarnya uang retribusi		58,75 %
8. cara pembayaran uang retribusi		53,125 %
9. warga tak bayar retribusi		67,500 %
persentase komulatif		74,58 %

Tabel 22
Aspek Pelaksanaan Terhadap Perda
No. 3 Tahun 1990

kategori	frekuensi	persentase
1. frekuensi membersihkan rumah dan pekarangannya		91,875 %
2. frekuensi membersihkan lingkungan perumahan:		
a. yang rutin		42,50 %
b. tak rutin		57,50 %
3. Tersedianya bak sampah sementara:		
a. pada setiap rumah		96,875 %
b. pada setiap RT		70,625 %
4. pengelolaan sampah oleh petugas		65,625 %
5. Dilarang buang sampah di sembarang tempat		67,500 %
persentase komulatif		70,35 %

Tabel 23
Aspek pemahaman terhadap
ajaran agama

kategori	frekuensi	persentase
1. Ajaran agama tentang kebersihan (kebersihan : sebagian dari iman)		96,250 %
2. Sikap orang beragama pada kebersihan		98,125 %
persentase komulatif		97,187 %

4.2. Analisa Data

4.2.1. Aspek Pemahaman

Tabel 1 menunjukkan jenis tempat tinggal responden. Pada tabel tersebut terlihat bahwa 100 % para responden tinggal pada rumah permanen. Tempat tinggal tersebut dapat dirinci lagi: 95,6 % tinggal di rumah permanen yang tidak bertingkat dan 4,4 % tinggal pada rumah permanen yang bertingkat (telah dilakukan renovasi).

Dengan demikian dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat yang tinggal di kompleks BTN Minasa Upa memiliki status sosial dan ekonomi yang baik. Untuk itu juga dapat di duga bahwa kualitas hidup dan kehidupannya cukup baik. Dan hal tersebut tentunya dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk dapat memahami dan melaksanakan Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Hal ini sesuai dengan kerangka pembangunan dalam GBHN (1993-1998) bahwa pembangunan perumahan dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang kesemuanya itu diarahkan guna terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Tabel 2 persepsi tentang pengaruh kebersihan lingkungan rumah tangga dan lingkungan perumahan bagi kehidupan manusia. Pada tabel tersebut terlihat bahwa persepsi masyarakat muslim di Minasa Upa tentang penting -

nya kebersihan rumah tangga dan kebersihan lingkungan perumahan sangat positif.

Pada tabel tersebut terlihat 97,50 % responden yang ada menjawab bahwa kebersihan lingkungan perumahan sangat positif atau sangat berpengaruh bagi kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan amanah yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1982 dan Perda No. 3 Tahun 1990 tentang perlunya dipelihara dan di jaga kebersihan lingkungan.

Pemahaman tersebut di atas juga dapat terwujud karena di dukung oleh adanya sosialisasi terhadap Perda No. 3 Tahun 1990, baik oleh Pemerintah maupun dengan dukungan lembaga-lembaga swasta yang ada.

Pada tabel 3 terlihat bahwa 76,875 % responden menjawab pernah mendapat informasi atau penyuluhan tentang lingkungan hidup (terutama masalah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan). Hanya 20,625 % responden yang menjawab tidak pernah mendapat informasi atau penyuluhan tersebut. Demikian juga hanya ada 2,5 % responden yang menjawab dengan ragu-ragu.

Dengan demikian jumlah responden yang mendapat informasi atau penyuluhan tentang kebersihan lingkungan jauh lebih banyak (76,875 %) dari pada yang tidak mendapat informasi atau penyuluhan dan termasuk yang ragu-ragu hanya 23,125 %.

Untuk itu dari sudut ini masyarakat muslim di Mina

memahami dengan baik Perda No. 3 Tahun 1990.

Tabel 4 berisi data tentang media tempat sosialisasi dari Perda No. 3 Tahun 1990. Pada tabel tersebut terlihat ada 4 (empat) media tempat sosialisasi dari perda tersebut.

Pertama, sosialisasi melalui media cetak (baik melalui surat kabar maupun majalah) persentasenya mencapai 33,75 %. Kedua, melalui media elektronik seperti; radio, televisi tingkat persentasenya memperlihatkan 25,625 %. Ketiga, ternyata dari jawaban responde yang masuk juga terlihat bahwa, media tempat sosialisasi dari Perda No. 3 Tahun 1990 juga ada yang melalui proses teman, artinya dari orang yang mengetahui kemudian disampaikan kepada orang yang belum mengetahui. Dari cara ini terdapat persentasenya 12,5 %. Keempat, dan media yang keempat adalah melalui Mesjid. Hanya media terakhir ini belum digunakan secara maksimal padahal media seperti ini cukup ampuh untuk menjadi tempat sosialisasi suatu peraturan. Pada media tersebut persentasenya hanya 5,00 %.

Tabel 5 tentang sebab-sebab para responden yang menjawab tidak pernah mendapat informasi tersebut. Warga masyarakat yang tidak mendapat informasi juga bervariasi antara lain:

a. Responden yang sama sekali tidak pernah men -

dapat informasi tentang kebersihan lingkungan oleh karena tidak pernah perhatikan karena kesibukan persentasenya sebanyak 16,25 %

b. Responden yang tidak tahu sama sekali apakah ada informasi atau tidak persentasenya hanya 5,626 %.

c. Sedangkan responden yang ragu-ragu persentasenya 1,25 %.

Berdasarkan data di atas akhirnya dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Perda No. 3 tahun 1990 khususnya tentang penyuluhan akan pentingnya kebersihan lingkungan, termasuk dalam hal ini adalah pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungannya, lebih banyak diakibatkan oleh karena warga masyarakat yang tidak pernah memperhatikannya sebagai akibat kesibukan, sebab ternyata sosialisasi dari Perda tersebut cukup intensif pada berbagai media yang ada.

Tabel 6 Tentang pemahaman terhadap Perda No. 3 Tahun 1990 khususnya tentang Tugas Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan.

Pada tabel 6 tersebut terlihat bahwa pemahaman masyarakat muslim di Minas Upa amat baik (87,50 %). Dengan demikian umumnya masyarakat muslim di Minasa Upa memahami bahwa tugas penyelenggaraan kebersihan lingkungan adalah tugas Pemda dengan peran serta

masyarakat.

Sedangkan masyarakat (responden) yang menjawab - dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan kebersihan lingkungan adalah tugas pemda persentasenya 2,50 % dan masyarakat yang menyatakan sebaliknya dengan kata lain itu tugas masyarakat persenentasenya 10 %.

Dengan demikian dari sisi pemahaman ini terlihat bahwa pemahaman masyarakat muslim di Minasa Upa terhadap Perda No. 3 Tahun 1990 juga amat baik. Untuk itu aspek ini perlu terus digalakkan dan dikembangkan guna mewujudkan pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 dengan baik. Hanya saja apakah aspek ini terwujud seiring dengan amat baiknya pemahaman yang ada dalam pengamalannya, akan kita lihat pada hasil penelitian dari aspek pelaksanaan dari Perda No. 3 Tahun 1990.

Tabel 7 tentang pemahaman terhadap Perda No. 3 khususnya pada pasal 6 ayat (2) bahwa: Kecuali di tempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan, dilarang membuang sampah di sungai-sungai, kanal, pantai, laut, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum berm-berm atau trotoar-trotoar dan tempat umum lainnya.

Seperti halnya pada beberapa aspek pemahaman sebelumnya, maka pada tabel 7, terlihat bahwa pemahaman

masyarakat muslim di Minasa Upa terhadap Perda No. 3 Tahun 1990 dari sisi pemahaman terhadap dilarang buang sampah selain di tempat yang telah ditentukan adalah amat baik.

Pada tabel 7 terlihat 100 % responden memahami adanya larangan membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan (pasal 6 ayat 2).

Bila tabel tersebut kita kaitkan dengan tabel 8, maka terlihat bahwa ternyata pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti oleh karena 26,25 % masyarakat yang ada di atas telah memahami dilarang buang sampah selain di tempat yang telah ditentukan, ternyata mereka (26,25 %) masih membuang sampah disembarang tempat.

4.2.2. Aspek Pelaksanaan

Tabel 8, tabel ini memperlihatkan tentang aspek pelaksanaan dari Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dari sisi pemungutan retribusi kebersihan lingkungan. Sebagaimana di atur dalam pasal 7 yang menyatakan:

ayat (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan untuk kebersihan dilingkungan dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah...
mengenakan Retribusi.

ayat (2) Retribusi dimaknakan pada ayat (1). pasal ini dikenakan kepada semua pemakai persil dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Berdasarkan jawaban responden yang ada pada tabel di atas, terlihat bahwa pemungutan retribusi kebersihan lingkungan bagi masyarakat muslim di Minasa Upa belum berjalan secara maksimal, dengan kata lain sangat jauh dari target.

Masyarakat yang menjawab adanya pemungutan retribusi kebersihan lingkungan di Minasa Upa hanya 53,125 %. Sedangkan masyarakat yang menjawab pernah ada pemungutan retribusi kebersihan lingkungan (dengan kata lain sekarang pemungutan tersebut terhenti) persentasenya 16,250 %. Masyarakat yang menjawab tidak ada pemungutan retribusi kebersihan di rumahnya persentasenya 30,625 %.

Berdasarkan data di atas jika kita kaitkan dengan besarnya uang retribusi yang masuk ke kas Pemerintah Daerah (Pemda), baik dalam bentuk hasil penagihan yang ada pada petugas kelurahan, petugas kecamatan maupun yang ada pada dinas kebersihan dan dinas pendapatan daerah terdapat korelasi.

Salah satu penyebabnya seperti dalam kasus yang terjadi di Minasa Upa penyebabnya adalah belum dikelolanya secara maksimal pemungutan uang retribusi kebersihan lingkungan tersebut.

Secara berurutan pola pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 dari sisi pemungutan retribusi kebersihan lingkungan di Minasa Upa adalah:

1. Masyarakat yang membayar retribusi kebersihan lingkungan persentasenya adalah 53,125 %.
2. Masyarakat yang pernah ada pemungutan retribusi kebersihan lingkungan kemudian dihentikan persentasenya terdapat 16,250 %.
3. Dan masyarakat yang sama sekali belum pernah membayar uang retribusi kebersihan lingkungan persentasenya sebanyak 30,625 %.

Tabel 9 berisi data tentang persepsi masyarakat muslim di Minasa Upa tentang besarnya uang retribusi kebersihan lingkungan.

Pada tabel 9 tersebut terlihat bahwa jawaban masyarakat cukup bervariasi. Terdapat 58,75 % masyarakat yang menjawab bahwa besarnya uang retribusi kebersihan lingkungan yang dibebankan kepadanya tidak mahal (sesuai). Hanya sayangnya penelitian berkaitan dengan persepsi besarnya uang retribusi tersebut tidak diperinci sampai sedetailnya, berapa besarnya uang retribusi yang di bayar masyarakat yang ada sehingga mereka menganggap besarnya uang retribusi tersebut dianggap tidak mahal (sesuai).

Sedangkan warga masyarakat Minasa Upa yang menganggap besarnya uang retribusi kebersihan lingkungan-

tersebut mahal persentasenya hanya 7,50 %. Sedangkan masyarakat yang berpendapat bahwa besarnya uang retribusi kebersihan lingkungan tersebut perlu dinaikkan karena dianggap terlalu murah persentasenya sebanyak 2,50 %.

Demikian juga masyarakat yang menjawab dengan ragu-ragu, dalam arti tidak dapat memberikan jawaban apakah besarnya uang retribusi kebersihan lingkungan tersebut mahal, tidak mahal atau perlu dinaikkan maka persentasenya terdapat 31,25 %.

Dengan demikian berdasarkan data-data yang ada pada tabel 9 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat muslim di kompleks perumahan BTN Minasa Upa tentang besarnya uang retribusi kebersihan lingkungan adalah baik.

Tabel 10, pada tabel ini terlihat data tentang cara penarikan uang retribusi kebersihan lingkungan di kompleks perumahan BTN Minasa Upa.

Pembayaran uang retribusi kebersihan lingkungan di Minasa Upa dilakukan dengan dua cara:

1. Membayar dengan cara di datangi oleh petugas (kolektor).
2. Membayar ke ORT, ORW atau ke Kelurahan.

Jumlah masyarakat yang membayar langsung ke petugas (kolektor) persentasenya 53,125 %. Sedangkan masyarakat yang membayar secara bervariasi, dalam hal

ini ada masyarakat yang membayar di RT, dan ada masyarakat yang membayar di RW serta ada masyarakat yang mengaku mereka membayar di kelurahan, untuk - cara ini persentasenya sebanyak 16,250 %.

Data pada tabel 10 di atas kelihatannya berbeda dengan cara yang selama ini ditempuh oleh pihak Pemerintah daerah yaitu, melalui kolektor yang setiap saat mendatangi masyarakat pada setiap rumah. Untuk hal ini, kiranya perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah daerah.

Bila terjadi cara pembayaran yang bervariasi seperti yang dikemukakan di atas maka kemungkinan dapat terjadi benturan dalam penarikan uang retribusi. Lain halnya bila penarikan tersebut ada koordinasi yang baik. Untuk itu sebaiknya cara pembayaran yang bervariasi tersebut dihentikan.

Memang di akui, cara penarikan atau pembayaran uang retribusi kebersihan lingkungan sampai kini masih menjadi masalah. Seperti dikatakan oleh petugas kelurahan persiapan Gunung Sari, menghadapi masalah berkaitan dengan tenaga kolektor yang sangat terbatas. Untuk wilayah kelurahan persiapan Gunung Sari dalam hal ini termasuk untuk kompleks perumahan BTN Mianan Upa hanya ada satu petugas (kolektor).

Demikian juga dengan hambatan yang dialami oleh petugas (kolektor) dalam menjalankan tugasnya

untuk menarik uang retribusi kebersihan lingkungan di antaranya: sering terjadi petugas beberapa kali datang pada sebuah rumah namun penghuninya tidak pernah dapat ditemui. Demikian juga sering pula terjadi penghuni dapat ditemui akan tetapi dengan berbagai alasan dia belum bisa membayar, sehingga petugas harus datang beberapa kali.

Tabel 11, Pada tabel ini tercantum data tentang persepsi masyarakat muslim di Minasa Upa tentang adanya kewajiban membayar uang retribusi kebersihan lingkungan.

Pada tabel tersebut terlihat antara lain:

1. Terdapat 78,125 % masyarakat yang menjadi responden menjawab setuju atau berpendapat bahwa seharusnya ada penarikan uang retribusi kebersihan lingkungan kepada masyarakat.
2. Hanya terdapat 13,125 % masyarakat yang menjadi responden yang berpendapat bahwa sebaiknya tidak perlu ada atau sebaiknya masyarakat tidak dibebani dengan pembayaran uang retribusi kebersihan lingkungan.
3. Sedangkan masyarakat yang menjadi responden yang menjawab dengan ragu-ragu dalam arti mereka tidak berpendapat apakah seharusnya ada penarikan uang retribusi atau tidak perlu ada penarikan uang retribusi kebersihan lingkungan

persentasenya hanya 8,750 %.

Dengan demikian berdasarkan tabel 11 di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat muslim di Minasa Upa tentang adanya pembebanan uang dalam hal penyelenggaraan kebersihan oleh Pemda kepada masyarakat sebagaimana di atur dalam Perda No. 3 Tahun 1990 cukup baik.

Untuk itu kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar selalu memelihara atau bahkan berupaya meningkatkan tingkat persepsi yang telah baik tersebut sehingga pada akhirnya nanti juga akan bermuara pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban retribusi tersebut. Dan tentu saja pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan kas Pemerintah Daerah.

Tabel 12, tabel ini berisi data tentang pandangan masyarakat muslim di Minasa Upa terhadap warga masyarakat atau warga kompleks perumahan yang tidak membayar uang retribusi kebersihan lingkungan.

Pada tabel 12 ini terlihat antara lain:

1. Terdapat 67.500 % masyarakat yang menjadi responden sependapat bahwa warga yang tidak membayar uang retribusi kebersihan lingkungan adalah sikap atau perbuatan salah dan dapat, dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (melanggar Perda No. 3 Tahun 1990).

2. Masyarakat atau responden yang menjawab bahwa warga yang tidak membayar uang retribusi ke - bersihan lingkungan, bukanlah sikap atau perbuatan yang salah sehingga tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum persentasenya hanya mencapai 13,125 %.
3. Demikian juga masyarakat yang menjawab dengan ragu-ragu, dalam arti tidak memahami apakah tindakan tidak membayar uang retribusi kebersihan lingkungan dapat digolongkan sebagai sikap atau perbuatan yang melanggar hukum atau bukan. Persentase masyarakat yang menjawab dengan ragu-ragu sebanyak 19,375 %.

Bila data yang ada pada tabel 12 di atas kita - simpulkan, maka masyarakat muslim yang ada di komplek perumahan BTN Minasa Upa pada umumnya sependapat bahwa sikap atau tindakan tidak membayar uang retribusi kebersihan lingkungan adalah melalaikan kewajiban.

Melalaikan kewajiban sebagaimana di atur di dalam Perda No. 3 Tahun 1990. Untuk itu dapat digolongkan - sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Akan tetapi - ironisnya seperti pada tabel 8, masih terdapat warga, masyarakat (46,875 %) yang tidak membayar uang retribusi kebersihan lingkungan.

Tentu saja tindakan tidak membayar uang retribusi kebersihan lingkungan, juga berarti tidak masuknya

uang retribusi kebersihan lingkungan ke kas pemerint -
 tah daerah. Sementara kita ketahui Pemerint ah Daerah
 sangat memerlukan dana untuk penyelenggaraan kebersi -
 han lingkungan dalam wilayah kotamadya daerah tingkat
 II Ujung Pandang. Sebagaimana pengakuan Walikota bahwa
 Ujung Pandang setiap tahun membutuhkan dana sekitar -
 1,2 milyar rupiah, sementara penerimaan dari uang ret-
 ribusi sangat jauh dari target.

Tabel 13, Tabel ini tentang pelaksanaan pengelola
 an kebersihan dalam lingkungan rumah tangga di komplek
 perumahan BTN Minasa Upa.

Pada tabel 13 tersebut data yang ada dapat diurai
 kan sebagai berikut:

1. Pada umumnya keluarga (setiap rumah tangga) di
 Minasa Upa aktif mengelola dan menjaga kebersi
 han rumah dan lingkungan rumahnya dengan per -
 sentase sebesar 91,875 % yang melakukannya se
 tiap pagi dan sore
2. Sedangkat keluarga atau masyarakat yang melaku
 kannya secara tidak tetap persentasenya sebe -
 sar 8,125 %.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 13 di atas
 maka kita dapat simpulkan bahwa perhatian kelu arga -
 atau masyarakat muslim yang ada di Minasa Upa terhadap
 penyelenggaraan kebersihan lingkungan rumah tangga sa-
 ngat besar.

Tabel 14, tabel ini menunjukkan tentang pelaksanaan pengelolaan kebersihan dalam lingkungan kompleks perumahan BTN Minasa Upa oleh warga masyarakatnya.

Data yang ada pada tabel 14 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Warga masyarakat muslim yang ada di Min asa Upa sering melakukan kerja bakti sesama warga perumahan untuk membersihkan lingkungan perumahan. Persentase jawaban masyarakat atau responden se besar 42,50 %.

2. Sedangkan warga masyarakat muslim di Minasa Upa yang kegiatan kerja baktinya sesama warga perumahan dengan cara tidak tetap dalam hal ini melihat situasi dan kondisi lingkungan perumahan, atau ada juga melakukan kerja bakti dalam rangka memperingati hari-hari besar.

Pada kelompok jawaban ini persentasenya adalah sebesar 57,50 %.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 14 di atas maka juga terlihat bahwa penyelenggaraan kebersihan di lingkungan kompleks perumahan BTN Minasa Upa khususnya bagi warga masyarakat yang muslim amat baik.

Untuk itu kesadaran akan perlu dan pentingnya kita menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan perumahan harus dipertahankan atau dikembangkan terus menerus karena manfaat kebersihan tersebut juga akan kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Tabel 15, tabel ini memperlihatkan pelaksanaan dari Perda No. 3 Tahun 1990 dari aspek pasal 4 ayat (2) tentang pemakaian persil menyediakan bak sampah dilingkungan persilnya.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim di lingkungan kompleks perumahan BTN Minasa Upa, telah melaksanakan dengan amat baik sisi perda ini seperti terlihat pada persentase jawaban responden sebesar 96,875 % telah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (bak sampah) di setiap rumah.
2. Sedangkan masyarakat muslim (rumah) pemakaian persil yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara (bak sampah) di rumahnya hanya dengan persentase 3,125 %.

Persentase tersebut pun terjadi dengan dua sebab yaitu: ada rumah yang dulunya pernah memiliki bak sampah, akan tetapi setelah rumahnya di renovasi, bak sampah tersebut rusak dan kemudian tidak pernah lagi diperbaiki atau dibuat bak sampah yang baru.

Dan ada juga masyarakat (rumah) yang sejak awal tidak pernah memiliki bak sampah, dan inilah juga salah satu sebab seperti kita temukan pada tabel lain ada warga yang membuang sampah pada-

sembarang tempat, sebab di mana dia akan membuang sampah bila dia tidak memiliki bak sampah sementara.

Tabel 16, seperti halnya yang ada pada tabel 15 maka pada tabel 16 ini juga berisi tentang pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 dari sudut penyediaan bak sampah sementara. Hanya saja bila tabel 15 tentang penyediaan bak sampah sementara pada setiap rumah tangga maka pada tabel 16 ini datanya tentang penyediaan bak sampah sementara dalam lingkungan ORT. Bak sampah tersebut sebagai tempat pembuangan sampah umum sementara setelah diangkat dari setiap rumah tangga.

Dari bak sampah ORT ini kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada tabel 16 ini data-data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum setiap ORT di Minasa Upa memiliki bak sampah sementara. Hal tersebut terlihat dari data yang ada, bahwa 70,625 % ORT memiliki bak sampah.
2. Sedangkan yang tidak memiliki hanya 28,75 % dan yang pernah ada, dalam arti sekarang sudah tidak ada persentasenya 0,625 %.

Dengan data di atas juga dapat disimpulkan bahwa dari aspek ini, Perda No. 3 Tahun 1990 tentang penyedi

aan bak sampah pada setiap rumah atau ORT, telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat muslim yang ada di kompleks perumahan BTN Minasa Upa.

Tabel 17, pada tabel ini diharapkan terungkap data tentang pengelolaan sampah rumah tangga dari keluarga muslim yang ada di kompleks perumahan BTN Minasa Upa. Data tersebut juga dijadikan salah satu aspek untuk menilai pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990.

Bila kita lihat pasal 5 yang mengatur antara lain: ayat (3) Pengangkutan sampah dari persil ke tempat pembuangan sampah sementara oleh masyarakat dikooordinir oleh Lurah/Kepala Lingkungan bekerjasama pengurus ORT/ORW setempat.

Kemudian dikaitkan dengan pasal 6 ayat (1) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kecuali di tempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah, dilarang membakar sampah dipekarangan atau ditempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu tempat-tempat sekelilingnya, ataukah membakar sampah dalam jarak 10 (sepuluh) meter dari bangunan atau jalan umum dan tidak dilakukan dalam lubang.

Ternyata bila kita lihat praktiknya pada masyarakat

muslim di Minasa Upa, maka pengelolaan kebersihan dalam hal ini penanganan limbah rumah tangga belum dikelola dengan baik sesuai peraturan yang ada.

Pola pengelolaan sampah rumah tangganya dilakukan antara lain: dengan cara di bakar yang persentasenya - sebesar 29,375 %, padahal cara seperti ini di larang - berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 1990. Cara lainnya adalah dengan menanam sampah rumah tangga yang ada dengan persentasenya sebesar 5,0 %.

Sedangkan masyarakat yang sampah (limbah) rumah - tangganya (terutama yang berbentuk sampah) dikelola - oleh petugas yang telah ada, maka persentasenya sebesar 65,625 %.

Untuk masyarakat yang sampah rumah tangganya tidak dikelola oleh petugas, dalam hal ini dilakukan dengan cara di bakar atau di tanam, pada akhirnya juga menjadi alasan untuk tidak membayar uang retribusi ke bersihan lingkungan (lihat tabel 8, 9 dan 10).

Berdasarkan format permasalahan di atas, maka pemerintah daerah bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah yang terbawah seperti, ORT atau ORW harus merencanakan dan mengelola dengan baik cara penanganan atau pengangkutan sampah terutama dalam kaitannya dengan - masalah penarikan uang retribusi kebersihan lingkungan dalam wilayah Ujung Pandang. Sebab bagaimanapun juga pelayanan juga harus menjadi dasar untuk membangkitkan

kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya - membayar uang retribusi kebersihan lingkungan.

Tabel 18, pada tabel ini termuat data tentang pelaksanaan atau pengujian terhadap pemahaman masyarakat muslim di Minasa Upa tentang dilarang buang sampah se lain di tempat yang telah ditentukan.

Pada tabel 7 kita telah lihat bahwa 100 % masyarakat muslim di Minasa Upa telah memahami adanya larangan buang sampah disembarang tempat (pasal 6 ayat 2). Hanya saja ironisnya, ternyata dalam praktik pemahaman tersebut tidak terwujud dengan baik.

Data yang ada pada tabel 18 memperlihatkan bahwa 26,25 % masyarakat masih atau pernah membuang sampah - di sembarang tempat. Dan yang ragu-ragu persentasenya sebesar 6,25 %. Sedangkan masyarakat yang mengamalkan pasal tersebut atau yang tidak pernah membuang sampah disembarang tempat persentasenya adalah sebesar 67,50 %.

Dengan demikian pada aspek ini Perda No. 3 Tahun 1990, belum dilaksanakan secara baik. Untuk itu perlu digalakkan upaya-upaya untuk mewujudkan aspek pemahaman yang telah ada (100 %) agar dipraktikkan secara - baik pula.

Masalah ini tentu saja kita serahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi perhatian. Sebab bagaimana pun juga hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap upaya menegakkan Perda No. 3 Tahun 1990 dan upaya untuk mewujudkan Ujung Pandang yang Teduh Bersinar.

4.2.3. Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama

Tabel 19, tabel ini berisi data tentang aspek pemahaman agama masyarakat muslim yang ada di Minasa Upa tentang kebersihan. Dan sebagai tolok ukur digunakan satu hadis nabi tentang; "Kebersihan adalah sebahagian dari iman". Adapun dasar hukum lainnya baik yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis nabi tidak dipermasalahkan dalam penelitian ini oleh karena titik berat penelitian ini bukanlah dari aspek agamanya.

Data pada tabel 19 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masyarakat muslim di Minasa Upa telah memahami dengan baik adanya perintah ajaran agamanya - bahwa kebersihan itu penting karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Persentase jawaban masyarakat dalam kaitan ini adalah 96,25 %.
2. Dan masyarakat yang tidak memahami dan ragu-ragu dalam memberikan jawaban, maka persentasenya hanya 3,75 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim di Minasa Upa memahami ajaran agamanya tentang kebersihan adalah sebagian dari iman dengan tingkat pemahaman yang amat baik (96,25 %).

Tabel 20, tabel ini berisi data tentang pemahaman dan pelaksanaan lebih lanjut dari pemahaman yang ada - pada tabel 19.

Tabel 20 ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama tentang kebersihan (tabel 19), telah-

dapat ditafsirkan dan dilaksanakan dengan amat baik seperti persentase jawaban masyarakat yang ada bahwa, 98,125 % telah menerapkan perintah tersebut ke dalam prinsip dan sikap perilakunya bahwa; orang beragama harus memperhatikan kebersihan.

Sedangkan kelompok masyarakat yang menjawab dengan ragu-ragu persentasenya hanya 1,875 %.

BAB V
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan:

1. Pemahaman masyarakat muslim di Minasa Upa terhadap Perda No. 3 Tahun 1990 dapat dikategorikan BAIK. Hal tersebut didasarkan pada persentase pemahaman mereka yang mencapai 74,50 %. Meskipun tingkat pemahaman tersebut baik, akan tetapi dapat pula diemukakan beberapa catatan antara lain:
 - 1.1. Sosialisasi Perda tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Masyarakat yang memahami adanya Perda tersebut persentasenya hanya mencapai 76,875 %.
 - 1.2. Salah satu media yang cukup baik untuk sosialisasi Perda tersebut adalah Mesjid, persentasenya 5,0 %.
2. Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 juga dapat dikategorikan BAIK dengan persentase 70,35 %. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan antara lain:
 - 2.1. Pengelolaan sampah oleh petugas kebersihan belum ditangani secara maksimal, persentasenya hanya mencapai 65,625 %.
 - 2.2. Penarikan retribusi kebersihan juga belum ditangani secara maksimal, persentase masyarakat yang membayar hanya mencapai 53,125 %.

Hal ini terjadi karena masyarakat merasa tidak wajib untuk membayar oleh karena Pemda tidak mengelola dengan baik sampah yang ada di setiap rumah tangga. Demikian juga dengan cara baru yang ditempuh Pemda dengan menggabungkan pembayaran retribusi kebersihan dengan pembayaran rekening listrik, masih perlu penelitian lebih lanjut karena terkesan pemaksaan.

2.3. Praktik membuang sampah disembarang tempat ternyata masih sering terjadi dengan persentasenya 67,50 %.

3. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam tentang kebersihan sangat menggembirakan oleh karena tingkat pemahamannya mencapai 96,25 % dan tingkat pengamalannya mencapai 98,125 %.

5.2. Saran-Saran:

1. Pemahaman dan pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1990 di Minasa Upa perlu terus ditingkatkan, karena pemahaman dan pelaksanaan yang baik dari Perda tersebut adalah juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya-upaya yang ada selama ini guna meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Perda tersebut, terutama hal-hal yang berkaitan dengan :

- 2.1. Kebiasaan membuang sampah selain di tempat -
yang telah ditentukan.
- 2.2. Penarikan uang retribusi kebersihan jangan ter
kesan dipaksakan.
- 2.3. Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggara-
an kebersihan lingkungan.

---oooOooo---

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Busroh, 1989 Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum (Suatu Pengantar Filsafat Hukum), Bhratara, Jakarta.
- Emil Salim, 1988 Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES Jakarta.
- GBHN 1993-1998
- Koentjaraningrat, 1989 Metode Metode Penelitian Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Otto Soemantri, 1989 Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan, Djambatan.
- Satjipto Rahardjo, 1983 Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung.
- 1986 Hukum Dan Masyarakat, Angkasa Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985 Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Remadja Karya CV, Bandung.
- UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perda No. 3 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Wilayah Daerah Tk. II Kotamadya Ujung Pandang.

